



**TERNATE**  
*Kota Rempah*

**BerAKHLAK'**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

# Peta Proses Bisnis

## DKP KOTA TERNATE





## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Peta Proses Bisnis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2024.

Penyusunan Peta Proses Bisnis bagi suatu unit kerja yang ada di instansi pemerintah atau lembaga tinggi negara merupakan suatu keharusan, karena dari Peta Proses Bisnis ini dapat diketahui gambaran efektifitas dan efisiensi hubungan kerja antara perangkat daerah/unit kerja dalam menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan pendirian organisasi untuk menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Kami menyadari bahwa Peta Proses Bisnis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, sumbangan pemikiran dan saran, sehingga di tahun mendatang kami bisa menyajikan Peta Proses Bisnis yang lebih baik, dan kami berharap semoga Peta Proses Bisnis ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate.

Ternate, Januari 2025

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kota Ternate



Faisal Harun Dano Husein, SP., M.Si  
NIP. 19750609 200312 1 007

## DAFTAR ISI

|                                                        | Halaman |
|--------------------------------------------------------|---------|
| KATA PENGANTAR.....                                    | ii      |
| DAFTAR ISI .....                                       | iii     |
| DAFTAR GAMBAR .....                                    | iv      |
| KEPUTUSAN KEPALA DINAS.....                            | v       |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                 | 6       |
| A. Latar Belakang .....                                | 6       |
| B. Maksud, Tujuan dan Manfaat. ....                    | 6       |
| C. Gambaran Umum .....                                 | 8       |
| BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .....            | 10      |
| A. Visi .....                                          | 10      |
| B. Misi.....                                           | 10      |
| C. Tujuan .....                                        | 10      |
| D. Sasaran .....                                       | 11      |
| E. Program Pembangunan Daerah .....                    | 11      |
| BAB III ORGANISASI PERANGKAT DAERAH .....              | 15      |
| A. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah .....            | 15      |
| B. Sistem Tugas dan Fungsi .....                       | 15      |
| C. Sumber Daya Manusia .....                           | 15      |
| BAB IV. PRINSIP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS.....     | 17      |
| A. Prinsip Penyusunan.....                             | 17      |
| B. Tahap dan Penyusunan Peta Proses Bisnis .....       | 17      |
| C. Penyusunan Peta Proses Bisnis DKP Kota Ternate..... | 18      |
| 1. Kebijakan Umum Program Pembangunan .....            | 19      |
| 2. Identifikasi Proses .....                           | 20      |
| BAB V PENUTUP.....                                     | 38      |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Kebijakan Umum Program Pembangunan .....                              | 19 |
| Gambar 2. Identifikasi Sub Proses-Lintas Fungsi .....                           | 24 |
| Gambar 3. Peta Proses DKP Kota Ternate .....                                    | 25 |
| Gambar 4. Peta Sub Proses DKP Kota Ternate .....                                | 28 |
| Gambar 5. Peta Relasi Program Pengelolaan Perikanan tangkap .....               | 34 |
| Gambar 6. Peta Relasi Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil<br>Perikanan ..... | 35 |
| Gambar 7. Peta Relasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>.....     | 36 |
| Gambar 8. Peta Relasi Program Pengelolaan Perikanan Budidaya .....              | 37 |

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS



WALI KOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE  
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN, MONITORING DAN EVALUASI PETA PROSES  
BISNIS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata laksana yang merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk efisiensi struktur organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses;
- b. bahwa dalam rangka penataan tata laksana, diperlukan penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

|      |            |
|------|------------|
| SKPD | BAG. HUKUM |
|      |            |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Reformasi birokrasi bertujuan untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik serta menjadikan Aparatur Sipil Negara yang lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi yang terencana dan sistematis bergantung pada proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome. Proses bisnis yang tidak berorientasi pada hasil dan tidak terukur antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi melakukan program dan kegiatan yang tidak optimal. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis. Adanya peta proses bisnis berguna untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaannya lebih terarah, dan memiliki standar dalam pelaksanaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Selain itu bisa juga digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

### **B. Maksud, Tujuan dan Manfaat.**

Penyusunan Peta Proses Bisnis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap bidang, dan seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, dan

terukur sesuai Visi, Misi, Tujuan, dan strategi Organisasi yang telah ditetapkan. Dokumen ini menggambarkan alur kerja dan hubungan antar proses dalam penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan di Kota Ternate. Sedangkan tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai proses kerja di seluruh unit organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan
- b) Memudahkan pengendalian dan evaluasi kinerja berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan
- c) Mengoptimalkan koordinasi dan integrasi antar unit kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan
- d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui standarisasi proses kerja
- e) Mendukung pencapaian visi dan misi organisasi secara terstruktur

Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah:

- a) Membantu pimpinan dan pegawai dalam memahami peran dan tanggung jawab masing-masing unit kerja
- b) Mengurangi tumpang tindih (*overlapping*) dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan
- c) Mempermudah identifikasi *bottleneck* dan *inefisiensi* dalam proses kerja
- d) Memberikan dasar yang jelas untuk pengembangan *Standard Operating Procedure* (SOP)
- e) Memudahkan proses monitoring dan evaluasi kinerja organisasi
- f) Mendukung upaya perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan publik
- g) Meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
- h) Membantu dalam proses transfer pengetahuan dan pelaksanaan tugas ketika terjadi rotasi atau pergantian pegawai

#### **A. Ruang Lingkup**

Penyusunan peta proses bisnis dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja Dinas.

### C. Gambaran Umum

Wilayah Kota Ternate yang mempunyai luas 5.795 km<sup>2</sup>, terdiri dari luas perairan 5.544,7 km<sup>2</sup> atau 95,67% dan luas daratan 250,55 km<sup>2</sup> atau 4,33% dengan bentangan pantai sepanjang ±124 km. Secara geografis, Kota Ternate merupakan kota pulau dan kota pantai yang terletak antara 1270 Bujur Timur dan 1240 Bujur Barat serta 30 - 30 Lintang Selatan dan terdiri dari 8 buah pulau, 3 diantaranya tidak berpenghuni, yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dengan Samudra Pasifik.
- Sebelah Selatan dan Barat dengan Laut Maluku.
- Sebelah Timur dengan Selat Halmahera.

Jumlah total penduduk Kota Ternate Tahun 2024 adalah 207.781 jiwa, jumlah ini terdiri dari 106.766 jiwa laki laki dan 101.015 jiwa perempuan (*sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Interim 2021 – 2024*), yang tersebar dalam 8 (delapan) wilayah Kecamatan, yaitu:

- Kecamatan Ternate Utara
- Kecamatan Ternate Tengah
- Kecamatan Ternate Selatan
- Kecamatan Ternate Barat
- Kecamatan Pulau Ternate
- Kecamatan Pulau Moti
- Kecamatan Pulau Batang Dua
- Kecamatan Pulau Hiri

Mata pencaharian penduduk di Kota Ternate yang paling dominan adalah nelayan, petani, peternak, perdagangan, dll.

Potensi perikanan di Kota Ternate terdiri dari perikanan budidaya, perikanan tangkap serta potensi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kawasan budidaya perikanan di Kota Ternate terdiri atas budidaya laut dan budidaya darat. Kawasan perikanan budidaya darat sebagian besar terdapat di Kelurahan Tadenas (Kecamatan Moti), Kelurahan Ngade dan Gambesi (Kecamatan Ternate Selatan). Jenis ikan meliputi ikan nila, mujair dan Mas. Khusus di Kelurahan Gambesi, Fitu dan Ngade merupakan budidaya (pembibitan) ikan air tawar. Rencana



pengembangan kawasan budidaya perikanan darat berupa intensifikasi lahan dan peningkatan produksi.

Kegiatan kawasan budidaya perikanan laut khususnya rumput laut terdapat pada Kecamatan Moti. Sedangkan untuk potensi Keramba Jaring Apung (KJA) berada di Kecamatan Batang Dua.

Sedangkan untuk kawasan perikanan tangkap tersebar pada seluruh wilayah kecamatan di Kota Ternate dengan jenis ikan yang ditangkap antara lain Pelagis besar antara lain jenis Tuna, Cakalang, Tenggiri, Kue (giant traveling) dan Cucut sedangkan Pelagis Kecil antara lain jenis layang, kembung, teri, julung, dan Tembang. Untuk jenis Ikan Demersal antara lain kakap, ikan kerapu, baronang.

Dan untuk produksi pengolahan hasil perikanan masih bergantung pada dukungan perikanan tangkap, karena bahan bakunya masih diperoleh dari hasil penangkapan di laut. Namun demikian produksi pengolahan memiliki distribusi pemasaran yang cukup luas dibandingkan dengan budidaya dan penangkapan itu sendiri. Pengolahan hasil perikanan di Kota Ternate terbagi atas tiga skala usaha, yaitu skala kecil yang meliputi pengeringan, penggaraman, pengasapan, fermentasi, dan pemindangan, kemudian skala menengah meliputi filet. Pengeringan, dan penggaraman, sedangkan skala besar meliputi pembekuan (frozen), pengasapan (smoked), dan filet (fillet).

## **BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

### **A. Visi**

Sebagai gambaran kedepan, maka sesuai dengan Visi Pemerintah Kota Ternate yang tercantum didalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan Ternate Yang Mandiri Dan Berkeadilan (**Ternate Andalan**), sebagai salah satu komitmen yang disepakati dan harus dilaksanakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah demi mewujudkan Kota Ternate sebagai Kota yang Mandiri dan Berkeadilan.

### **B. Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Dinas kelautan dan perikanan mengemban amanat pada Misi 1 yaitu Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional dan Misi 5 yaitu Setiap Warga Memiliki Hak dan Kesempatan yang Sama Dalam Berekonomi, maka ditetapkan program prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya di Kota Ternate
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya di Kota Ternate
- 3) Pemberdayaan kelompok nelayan, pembudidaya serta kelompok pengolahan dan pemasaran ikan skala mikro dan kecil di Kota Ternate

### **C. Tujuan**

Sejalan dengan visi dan misi diatas, maka tujuan pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya.
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana sektor informal terhadap kelompok nelayan, pembudidaya dan juga kelompok pengolahan dan pemasaran perikanan skala mikro dan kecil.

#### **D. Sasaran**

Sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kota Ternate adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi kelompok nelayan, pembudidaya dan kelompok pengolah dan pemasaran perikanan skala mikro dan kecil
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap, budidaya dan kelompok pengolahan dan pemasaran perikanan skala mikro dan kecil.

#### **E. Program Pembangunan Daerah**

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang diampu Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate adalah sebagai berikut:

##### **1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Tujuan Program ini adalah untuk merencanakan kegiatan pembangunan secara terpadu, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pembangunan serta memenuhi kebutuhan sarana prasarana aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate, dengan sasaran meningkatnya pelayanan yang prima, meningkatnya kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate. Adapun kegiatan dan sub kegiatan program ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### **b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
  - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
  - Pemulangan Pegawai Yang Pensiun
  - Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
  - Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
  - Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung kantor Atau Bangunan Lainnya.



## **2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

Tujuan program adalah Peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap, Nilai Tukar Nelayan (NTN), Perizinan Usaha yang diterbitkan, Persentase kapal perikanan bermotor, Jumlah pelabuhan perikanan yang beroperasi dan memenuhi persyaratan pelabuhan perikanan dan Retribusi Pelayanan Pelabuhan Perikanan Pantai (P3) Antang. Adapun kegiatan dan sub kegiatan program ini adalah sebagai berikut:

### **a. Pengelolaan Penangkapan Ikaan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota**

- Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
- Penyediaan Prasarana Usaha PerikananTangkap

### **b. Pemberdayaan Nelayan kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota**

- Pengembangan kapasitas Nelayan Kecil
- Pelaksanaan fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil.

### **c. Penertiban Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

- Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT.

## **3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

Tujuan program adalah meningkatkan dan mengembangkan sektor perikanan budidaya, dengan sasaran peningkatan produksi perikanan budidaya, Nilai TukarPembudidaya Ikan (NTPi), Jumlah Balai Benih Ikan (BBI). Adapun kegiatan dan sub kegiatan program ini adalah sebagai berikut:

### **a. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**

- Pengembangan kapasitas Pembudi daya Ikan Kecil
- Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan Dan pelatihan

### **b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**

- Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota.
- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota
- Pengelolaan Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Budidaya Ikan 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

#### **4) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan**

Tujuan program adalah meningkatkan dan mengembangkan sektor pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, dengan sasaran mendukung peningkatan produksi hasil kelautan dan perikanan, Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasar hasil perikanan yang mendapatkan Surat Kelayakan Pengolahan (SKP). Adapun kegiatan dan sub kegiatan program ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil**

- 1) Penyediaan Data dan Informasi usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

##### **b. Penyediaan Dan Penyaluran Bahan baku Industri pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota.**

- 1) Pemberian Fasilitas Bagi pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota

##### **c. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**

- 1) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

### **BAB III ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

#### **A. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Ternate No. 19 tahun 2017 tentang tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate, maka susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan. Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat;
- 3) Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- 4) Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- 5) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

#### **B. Sistem Tugas dan Fungsi**

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah. Tugas dan fungsi Dinas Kelautan Perikanan sebagai berikut:

1. Perumuskan kebijakan teknis bidang perikanan dan kelautan; pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
2. Pengujian teknologi dalam rangka penetapan teknologi anjuran ;
3. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan usaha kelautan dan perikanan;
4. Pembinaan terhadap nelayan;
5. Penyelenggaraan urusan tata usaha dinas;
6. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah

#### **C. Sumber Daya Manusia**

Jumlah personil/pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2024 berjumlah 102 orang yang terdiri dari Tenaga Teknis

Perikanan maupun administrasi. Adapun rincian berdasarkan status kepegawaian dan kepangkatannya adalah sebagai berikut:

2) Berdasarkan Status Kepegawaian

PNS : 50 Orang

PTT : 52 Orang

Sukarela : -

3) Berdasarkan Pangkat

Gol IV : 11 Orang

Gol III : 33 Orang

Gol II : 6 Orang

Gol I : -

Perkembangan pegawai menurut status pendidikan dirinci berdasarkan jenis kelamin di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

| No | Jenis Pendidikan | Pria      | Wanita    | Jumlah    |
|----|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | Sarjana (S2)     | 6         | 5         | 11        |
| 2  | Sarjana (S1)     | 12        | 20        | 32        |
| 3  | Diploma          | 1         | -         | 1         |
| 4  | SLTA             | 4         | 2         | 6         |
|    | <b>Jumlah</b>    | <b>23</b> | <b>27</b> | <b>50</b> |

Jumlah Pejabat Struktural : 8 Orang

Jumlah Pejabat Fungsional : 8 Orang

## BAB IV. PRINSIP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

### A. Prinsip Penyusunan

Penyusunan peta proses bisnis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate menggunakan beberapa prinsip sebagai berikut:

- 1) **Definitif**, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas.
- 2) **Urutan**, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang.
- 3) **Pelanggan atau pengguna layanan**, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi.
- 4) **Nilai tambah**, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima.
- 5) **Keterkaitan**, yakni suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi.
- 6) **Fungsi silang**, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi
- 7) **Representatif**, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana.
- 8) **Konsensus (Kesepakatan)**, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah. Penyusunan proses bisnis bersifat subyektif dan kualitatif, karena proses bisnis merupakan cara pandang terhadap keseluruhan rangkaian kegiatan ataupun aktifitas dalam suatu periode waktu tertentu. Sehingga perlu kesepakatan oleh berbagai pihak terkait terutama pemilik proses bisnis dan pengambilan keputusan oleh pimpinan

### B. Tahap dan Penyusunan Peta Proses Bisnis

Penyusunan peta proses bisnis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate dilakukan melalui 2 tahap yaitu:

- 1) Tahap Persiapan dan Perencanaan

Langkah awal penyusunan peta proses bisnis yaitu melakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi,



misi, tujuan dan sasaran instansi pemerintah sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas (proses kerja) yang ada dalam instansi pemerintah tersebut. Proses kerja/aktivitas tersebut kemudian dikategorikan ke dalam kelompok (folder) kegiatan. Dalam pengelompokan seluruh aktivitas/proses kerja/kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah ada 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:

- 1) Pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan;
- 2) Pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan / aktivitas / proses kerja yang dilakukan di dalam instansi pemerintah;
- 3) Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan

## 2) Tahap Pengembangan

Dalam tahap ini akan dilakukan penyusunan peta proses bisnis organisasi atau business process mapping. Untuk dapat membangun pemetaan proses bisnis organisasi yang representatif, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses yang akan dipetakan. Demi memudahkan penggambaran peta proses bisnis, maka peta proses bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa level atau tingkatan (level 0, level 1, level 2, dan selanjutnya) atau jenis gambar peta yaitu peta proses, subproses, relasi, dan lintas fungsi.

## C. Penyusunan Peta Proses Bisnis DKP Kota Ternate

## 1. Kebijakan Umum Program Pembangunan

| No                                                                                              | Sasaran                                           | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                           | Arah Kebijakan                                                                                       | Indikator Kinerja (outcome)                                                                                     | Program Pembangunan Daerah                       | Bidang Urusan                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Misi 1 : Menciptakan kemandirian Ekonomi Masyarakat, Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                  |                                                 |
| Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas                                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                  |                                                 |
| 1                                                                                               | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas | Peningkatan sinergitas kegiatan ekonomi antar pulau Ternate dan daya tarik pariwisata yang mendukung daya saing ekonomi, serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi | Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Tiap Tahun Perencanaan                       | Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Tiap Tahun Perencanaan                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | Bagian Perencanaan                              |
|                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap                                                               | ProsentasePeningkatan Produksi Perikanan Tangkap                                                                | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap            | Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap            |
|                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Penyediaan dan Pengembangan Sarana Perikanan                                                         | Prosentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Perikanan                                                         |                                                  |                                                 |
|                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya                                                              | Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya                                                              | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya           | Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya           |
|                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Peningkatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                     | Prosesntase Peningkatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                    |                                                  |                                                 |
| Misi 5 : Setiap Warga Memiliki Hak dan Kesempatan Yang Sama Dalam Berekonomi                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                  |                                                 |
| Tujuan : Menyediakan Sarana dan Prasarana Sektor Informal                                       |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                  |                                                 |
| 2                                                                                               | Tersedianya Sarana Prasarana Sektor Informal      | Pengurangan angka pengangguran dengan peningkatan kompetensi dan membangun semangat wirausaha melalui penyediaan sarana prasarana sektor infomal                                                                                                                   | Peningkatan Produksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan                                        | Prosentase Peningkatan Produksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan                                        | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan |
|                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Peningkatan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Prosentase Peningkatan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil |                                                  |                                                 |

Gambar 1. Kebijakan Umum Program Pembangunan

## 2. Identifikasi Proses

Identifikasi proses dalam penyusunan proses bisnis adalah proses untuk menentukan ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan, berupa program yang dipetakan kedalam jenis proses utama, pendukung dan proses lainnya. Identifikasi ini dilakukan berdasarkan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Berikut merupakan pemetaan program Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Jenis Prosesnya.

| NO | PROSES (PROGRAM)                                    | UTAMA /<br>PENDUKUNG /<br>LAINNYA | KODE      |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 2                                                   | 3                                 | 4         |
| 1  | Pengelolaan Perikanan Tangkap                       | Utama                             | DKP.KT.01 |
| 2  | Pengelolaan Perikanan Budidaya                      | Utama                             | DKP.KT.02 |
| 3  | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan            | Utama                             | DKP.KT.03 |
| 4  | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Pendukung                         | DKP.KT.04 |

Dinas Kelautan dan perikanan Kota Ternate pada Tahun 2024 memprogramkan 4 program, 15 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan

1) Identifikasi Sub Proses-Lintas Fungsi

| NO | SUB PROSES (KEGIATAN)                                                                                                                                      | KODE SUB PROSES | LINTAS FUNGSI (SUB KEGIATAN)                                                                                                     | KODE LINTAS FUNGSI |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                          | 4               | 5                                                                                                                                | 6                  |
| 1  | <b>DKP.KT.01 - Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>                                                                                                           |                 |                                                                                                                                  |                    |
|    | Pengelolaan Penangkapan Ikaan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan                                        | DKP.KT.01.01    | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                   | DKP.KT.01.01.01    |
|    |                                                                                                                                                            |                 | Penyediaan Prasarana Usaha PerikananTangkap                                                                                      | DKP.KT.01.01.02    |
|    | Pemberdayaan Nelayan kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                     | DKP.KT.01.02    | Pengembangan kapasitas Nelayan Kecil                                                                                             | DKP.KT.01.01.03    |
|    |                                                                                                                                                            |                 | Pelaksanaan fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil                                                    | DKP.KT.01.01.04    |
|    | Penertiban Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan | DKP.KT.01.03    | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT                                                  | DKP.KT.01.01.05    |
| 2  | <b>DKP.KT.02 - Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>                                                                                                          |                 |                                                                                                                                  |                    |
|    | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                                       | DKP.KT.02.01    | Pengembangan kapasitas Pembudi daya Ikan Kecil                                                                                   | DKP.KT.02.01.01    |
|    |                                                                                                                                                            |                 | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan | DKP.KT.02.01.02    |
|    | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                                                                             | DKP.KT.02.02    | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan                                                                                 | DKP.KT.02.02.01    |
|    |                                                                                                                                                            |                 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan                                                                                          | DKP.KT.02.02.02    |
|    |                                                                                                                                                            |                 | Pengelolaan Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Budidaya Ikan                                                                          | DKP.KT.02.02.03    |

| NO | SUB PROSES (KEGIATAN)                                                                                 | KODE SUB PROSES | LINTAS FUNGSI (SUB KEGIATAN)                                                                                           | KODE LINTAS FUNGSI |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | 2                                                                                                     | 4               | 5                                                                                                                      | 6                  |
| 3  | <b>DKP.KT.03 - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>                                   |                 |                                                                                                                        |                    |
|    | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil             | DKP.KT.03.01    | Penyediaan Data dan Informasi usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan                                           | DKP.KT.03.01.01    |
|    | Penyediaan Dan Penyaluran Bahan baku Industri pengolahan Ikan                                         | DKP.KT.03.02    | Penyediaan Dan Penyaluran Bahan baku Industri pengolahan Ikan                                                          | DKP.KT.03.01.02    |
|    | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | DKP.KT.03.03    | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | DKP.KT.03.01.03    |
| 4  | <b>DKP.KT.04 - Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                |                 |                                                                                                                        |                    |
|    | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | DKP.KT.04.01    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                        | DKP.KT.04.01.01    |
|    |                                                                                                       |                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                             | DKP.KT.04.01.02    |
|    |                                                                                                       |                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | DKP.KT.04.01.03    |
|    |                                                                                                       |                 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                     | DKP.KT.04.01.04    |
|    |                                                                                                       |                 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                                                           | DKP.KT.04.01.05    |
|    |                                                                                                       |                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                  | DKP.KT.04.01.06    |
|    |                                                                                                       |                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                      | DKP.KT.04.01.07    |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                | DKP.KT.04.02    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                      | DKP.KT.04.02.01    |
|    |                                                                                                       |                 | Koorsinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                              | DKP.KT.04.02.02    |

| NO | SUB PROSES (KEGIATAN)                                            | KODE SUB PROSES | LINTAS FUNGSI (SUB KEGIATAN)                                  | KODE LINTAS FUNGSI |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | 2                                                                | 4               | 5                                                             | 6                  |
|    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | DKP.KT.04.03    | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian             | DKP.KT.04.03.01    |
|    |                                                                  |                 | Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian       | DKP.KT.04.03.02    |
|    |                                                                  |                 | Pemulangan Pegawai Yang Pensiun                               | DKP.KT.04.03.03    |
|    |                                                                  |                 | Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi | DKP.KT.04.03.04    |
|    |                                                                  |                 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan    | DKP.KT.04.03.05    |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | DKP.KT.04.04    | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan kantor                  | DKP.KT.04.04.01    |
|    |                                                                  |                 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                              | DKP.KT.04.04.02    |
|    |                                                                  |                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                       | DKP.KT.04.04.03    |
|    |                                                                  |                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan      | DKP.KT.04.04.04    |
|    |                                                                  |                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     | DKP.KT.04.04.05    |
|    |                                                                  |                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | DKP.KT.04.04.06    |
|    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | DKP.KT.04.05    | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                         | DKP.KT.04.05.01    |



| NO | SUB PROSES (KEGIATAN)                                               | KODE SUB PROSES | LINTAS FUNGSI (SUB KEGIATAN)                                                                                        | KODE LINTAS FUNGSI |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | 2                                                                   | 4               | 5                                                                                                                   | 6                  |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  | DKP.KT.04.06    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                                                             | DKP.KT.04.06.01    |
|    |                                                                     |                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | DKP.KT.04.06.02    |
|    |                                                                     |                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | DKP.KT.04.06.03    |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | DKP.KT.04.07    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | DKP.KT.04.07.01    |
|    |                                                                     |                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan     | DKP.KT.04.07.02    |
|    |                                                                     |                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung kantor Atau Bangunan Lainnya                                  | DKP.KT.04.07.03    |

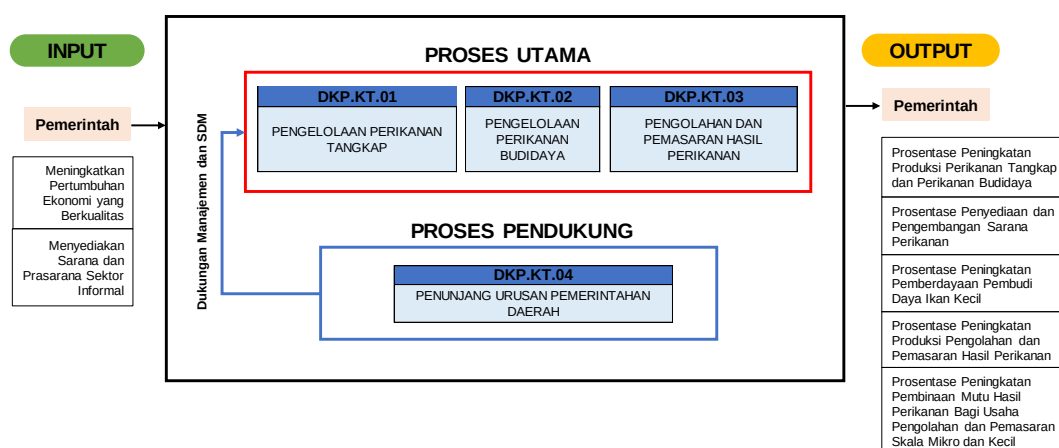
Gambar 2. Identifikasi Sub Proses-Lintas Fungsi

## 2) Identifikasi Peta Proses

Peta proses bisnis merupakan peta yang menggambarkan seluruh proses atau seluruh aktivitas yang terdapat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate. Dimana aktivitas tersebut adalah proses utama.

Proses utama merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses utama berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Sedangkan proses pendukung atau manajerial merupakan proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik

Berdasarkan jumlah sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate terdiri dari 2(dua) sasaran yaitu “Meningkatkan Produksi Perikanan” dan “Meningkatkan penyediaan sarana dan Prasarana Perikanan”. Selanjutnya menjadi Peta Proses Bisnis pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Selengkapanya, gambar Peta Proses Bisnis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate sebagai berikut:



Gambar 3. Peta Proses DKP Kota Ternate

## 3) Identifikasi Peta Sub Proses

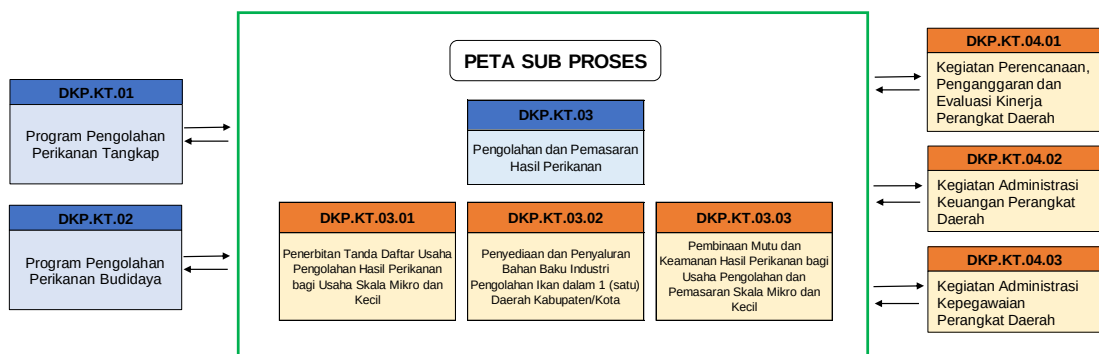
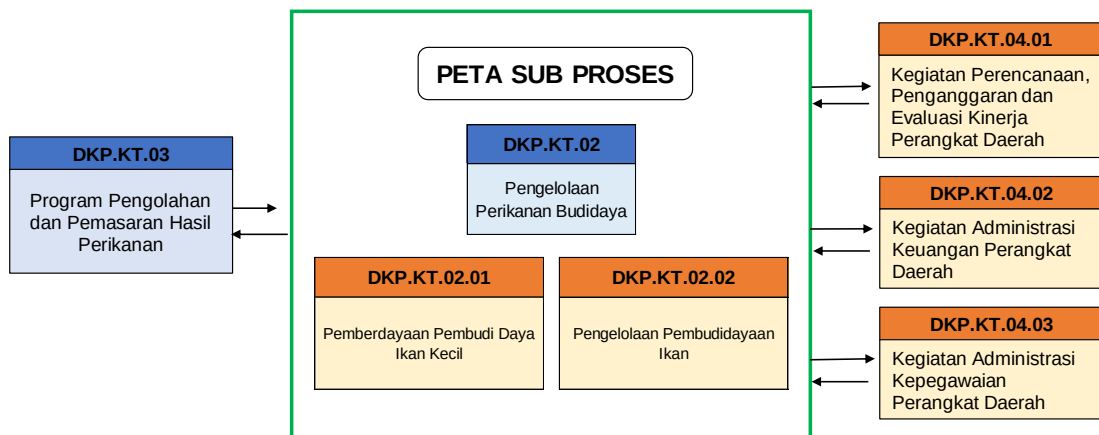
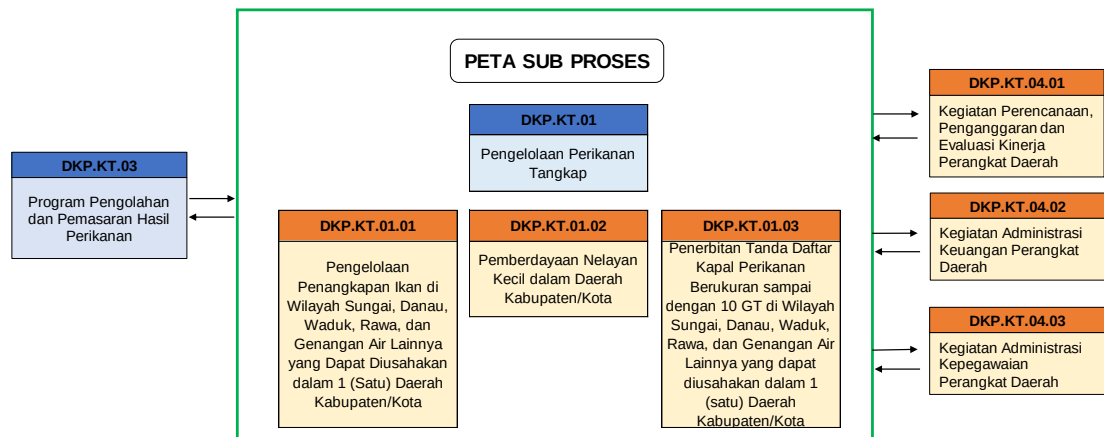
Peta Sub Proses atau peta proses bisnis level 1 merupakan turunan dari peta proses bisnis level 0 atau peta proses, yang menguraikan turunan proses dari setiap proses inti, proses pendukung

serta proses lainnya. Selanjutnya peta proses bisnis level 1 juga dapat diturunkan sampai level -n yang disepakati.

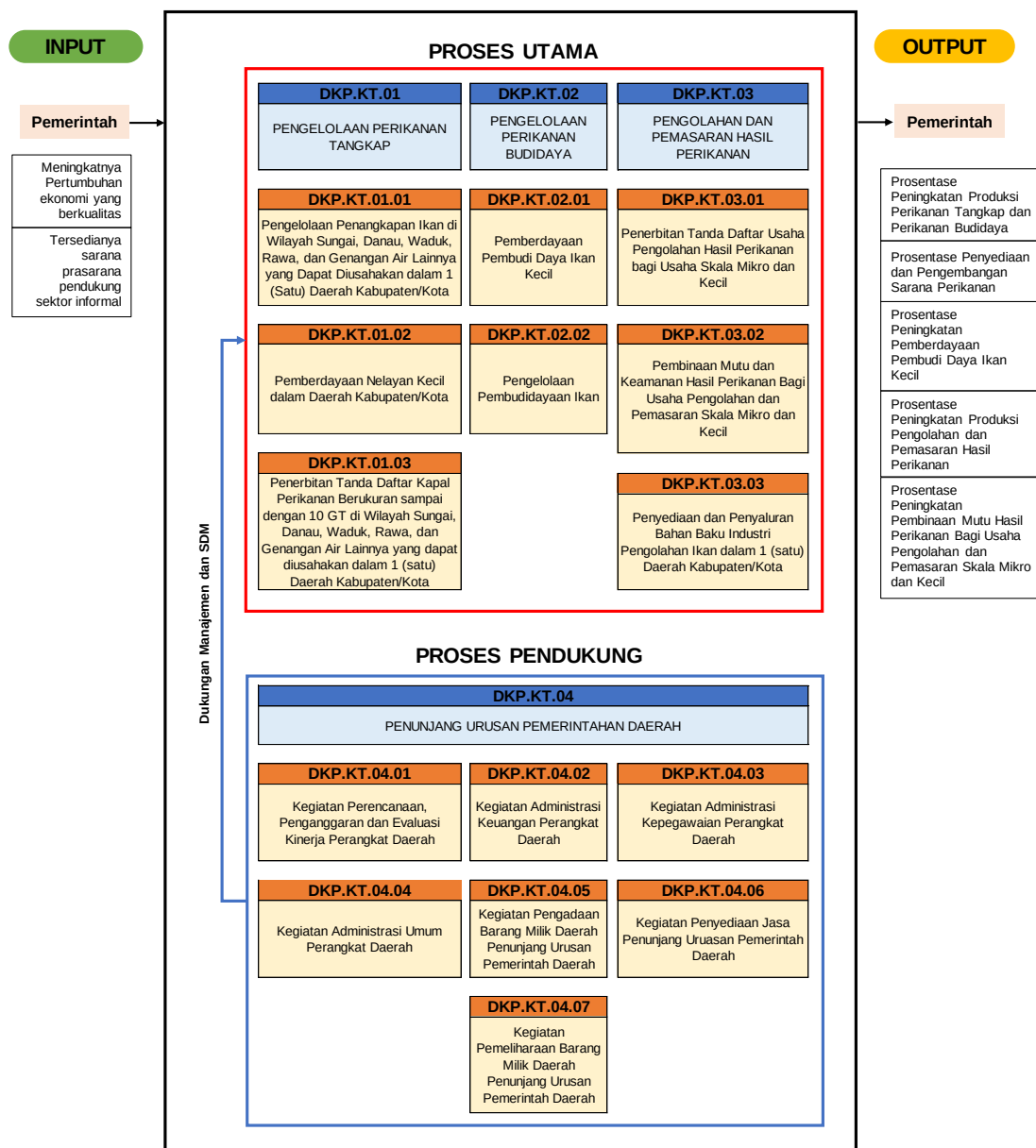
Peta Sub Proses Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate sebagai berikut:

- 1) **DKP.KT.01** – Pengelolaan Perikanan Tangkap, didukung oleh peta sub proses;
  - a. **DKP.KT.01.01** - Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota, didukung oleh peta sub
  - b. **DKP.KT.01.02** - Pemberdayaan Nelayan kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - c. **DKP.KT.01.03** - Penertiban Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2) **DKP.KT.02** – Pengelolaan Perikanan Budidaya, didukung oleh peta sub proses;
  - a. **DKP.KT.02.01** - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
  - b. **DKP.KT.02.02** - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
- 3) **DKP.KT.03** - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, didukung oleh peta sub proses;
  - a. **DKP.KT.03.01** - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil
  - b. **DKP.KT.03.02** - Penyediaan Dan Penyaluran Bahan baku Industri pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota.
  - c. **DKP.KT.03.03** - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- 4) **DKP.KT.04** - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, didukung oleh peta sub proses;
  - a. **DKP.KT.04.01** - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. **DKP.KT.04.02** - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. **DKP.KT.04.03** - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. **DKP.KT.04.04** - Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. **DKP.KT.04.05** - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  
Urusan Pemerintah Daerah
- f. **DKP.KT.04.06** - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan  
Pemerintah Daerah
- g. **DKP.KT.04.07** - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang  
Urusan Pemerintah Daerah



## PETA PROSES BISNIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



Gambar 4. Peta Sub Proses DKP Kota Ternate

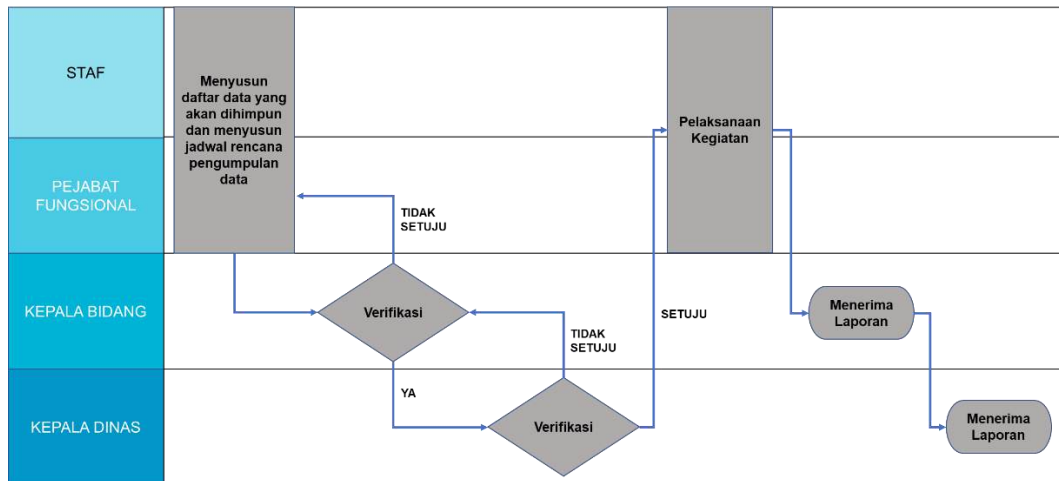
### 4) Identifikasi Peta Lintas Fungsi

Peta Lintas Fungsi berisikan tentang hubungan antar unit kerja terkait dalam mencapai sebuah hasil keluaran yang bernilai tambah. Dimulai dari kegiatan, sub kegiatan, serta tim dalam sebuah sub kegiatan

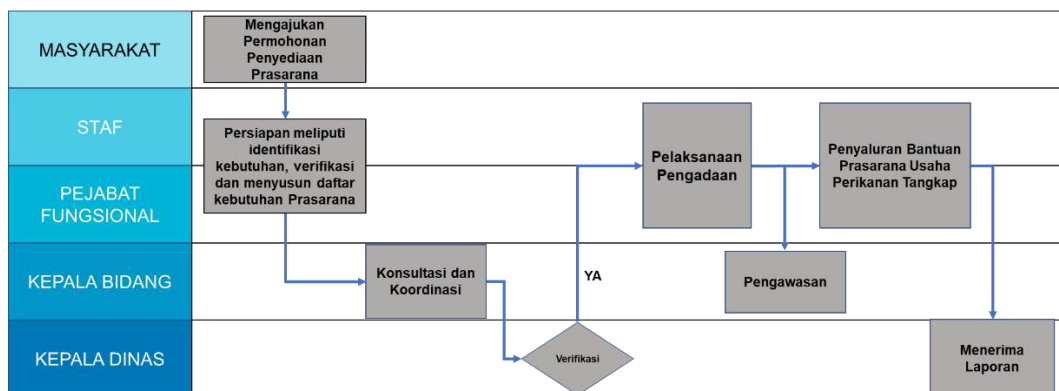
## DKP.KT.01 - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

DKP.KT.01.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota

DKP.KT.01.01.01 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

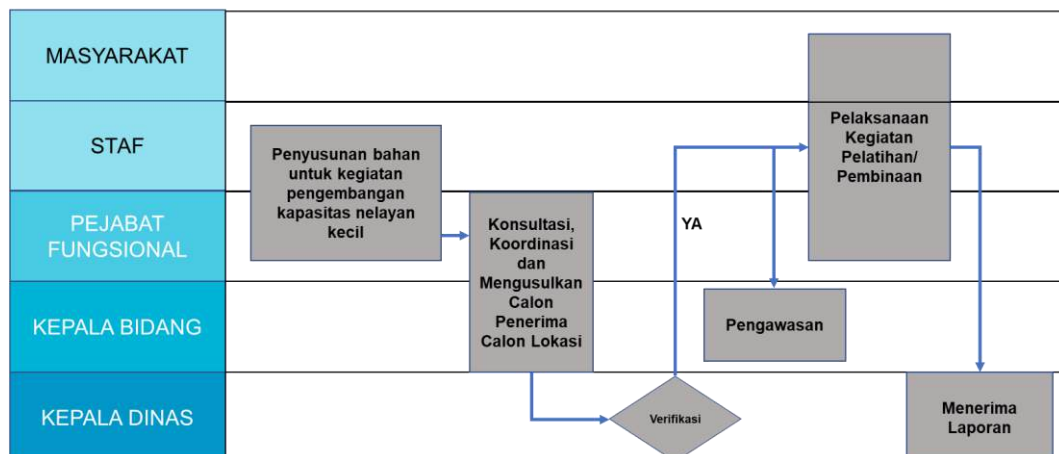


DKP.KT.01.01.02 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

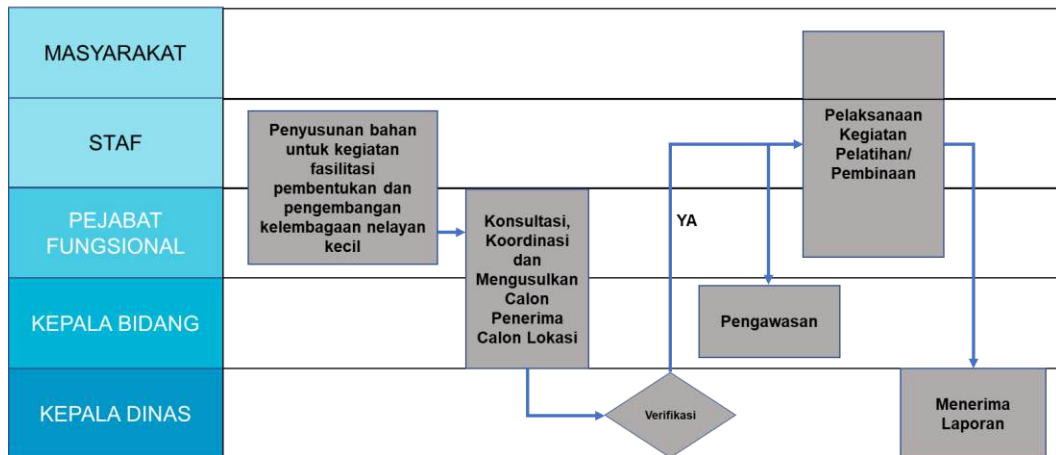


DKP.KT.01.02 - Pemberdayaan Nelayan kecil Dalam Daerah Kab/Kota

DKP.KT.01.02.01 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

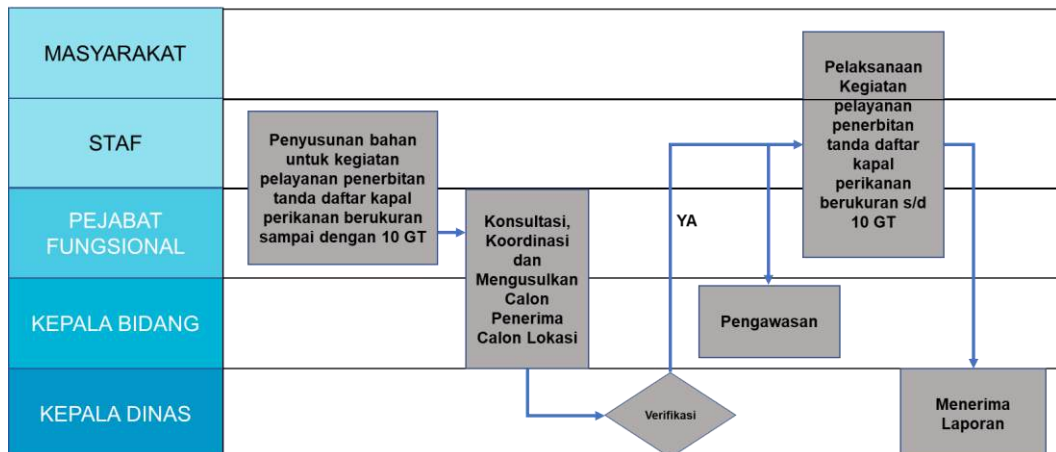


DKP.KT.01.02.02 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil



DKP.KT.01.03 - Penertiban Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

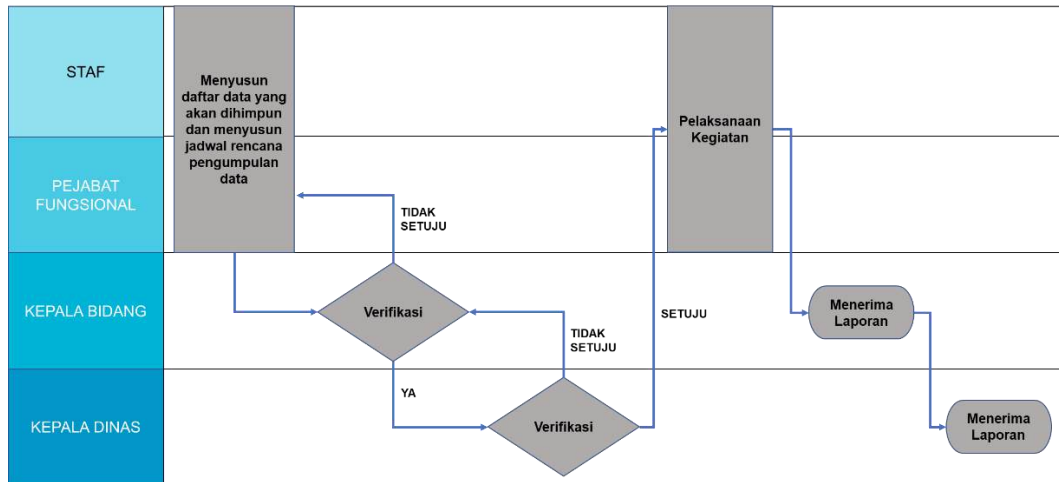
DKP.KT.01.03.01 - Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai dengan 10 GT



DKP.KT.03 - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

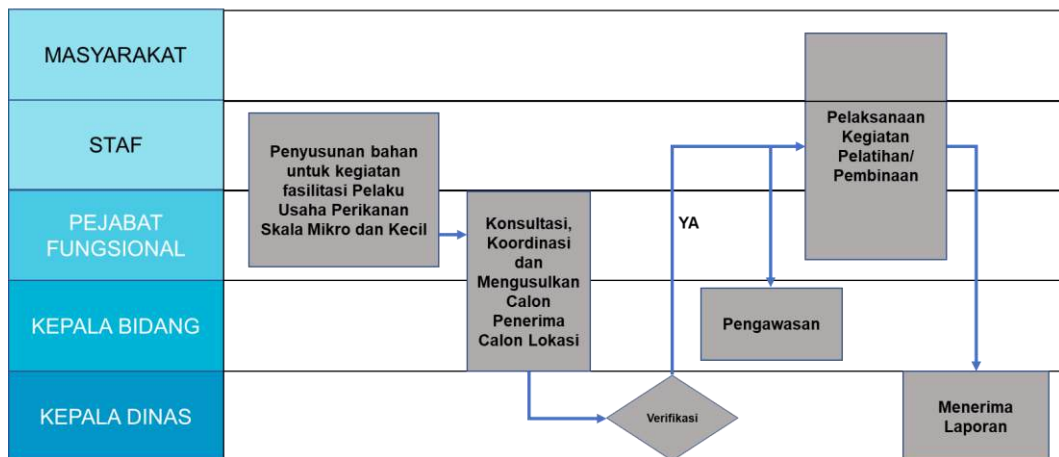
DKP.KT.03.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil





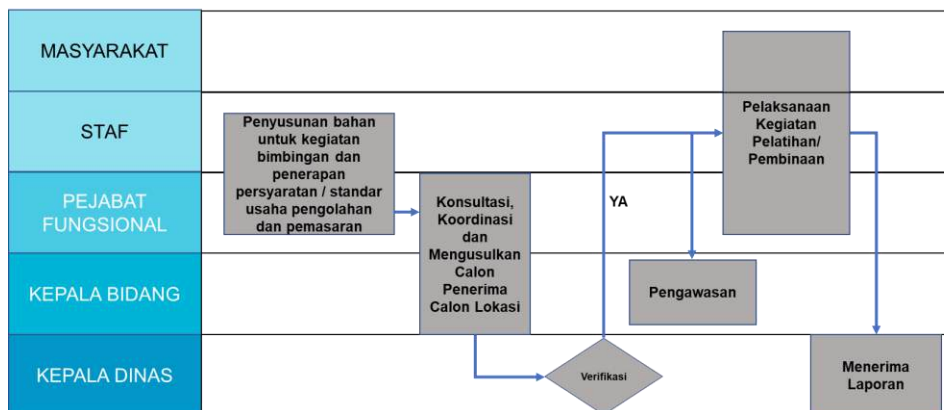
### DKP.KT.03.03 - Penyediaan Dan Penyaluran Bahan baku Industri pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota.

DKP.KT.03.03.01 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



### DKP.KT.03.02- Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

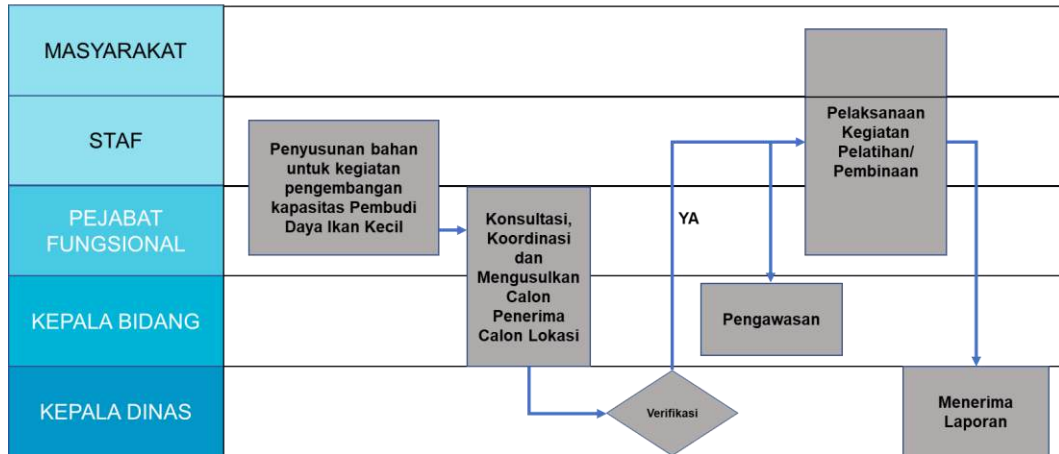
DKP.KT.03.02.01 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan kecil



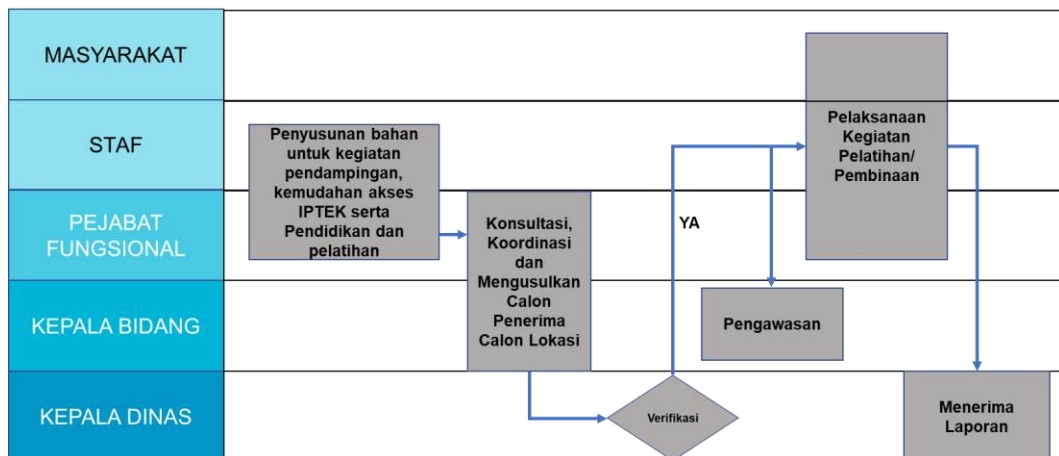
### DKP.KT.02 - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

#### DKP.KT.02.01 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

DKP.KT.02.01.01 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan kecil

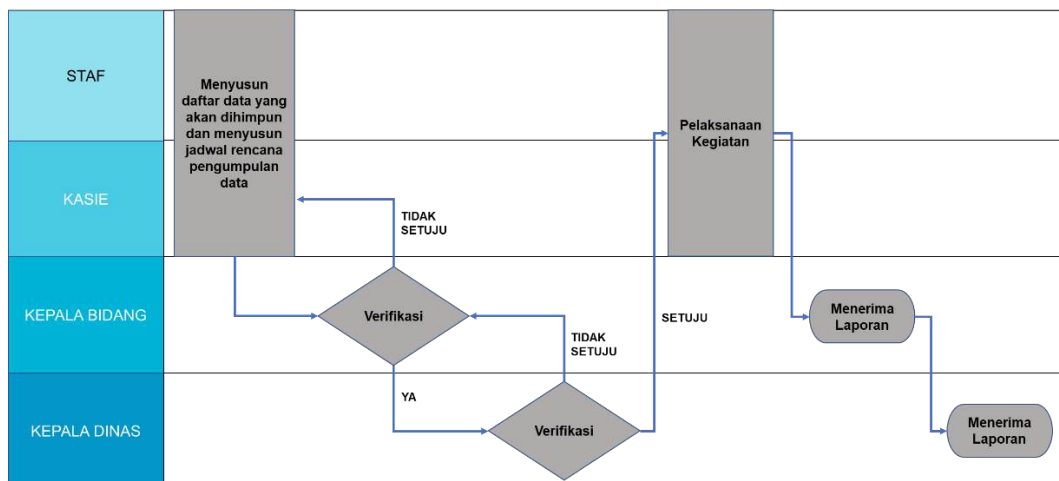


DKP.KT.02.01.02 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

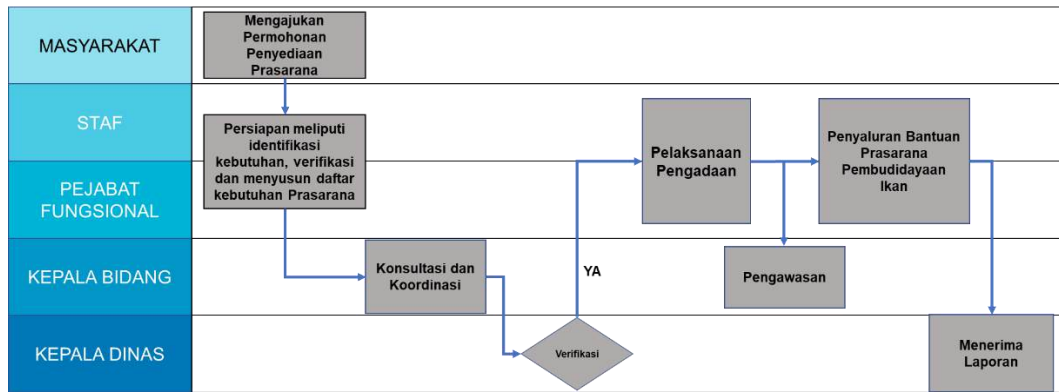


DKP.KT.02.02 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

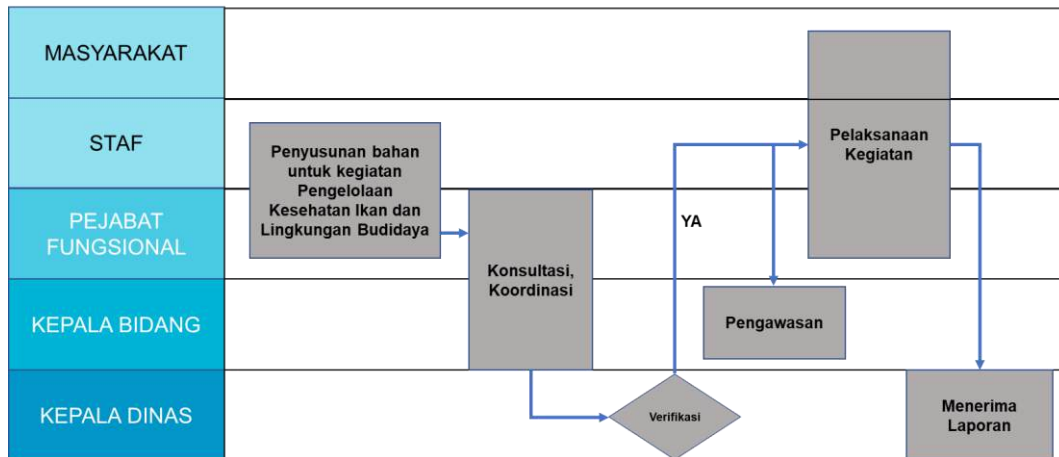
DKP.KT.02.02.01 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



DKP.KT.02.02.02 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



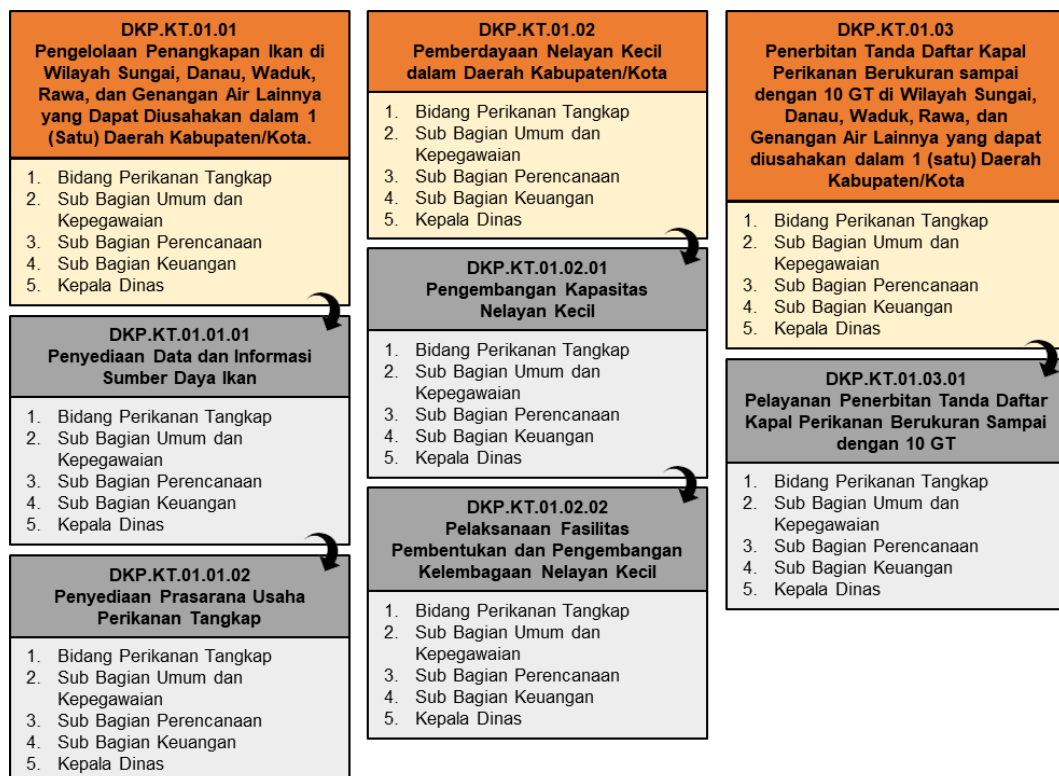
DKP.KT.02.02.03 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



## 5) Peta Relasi

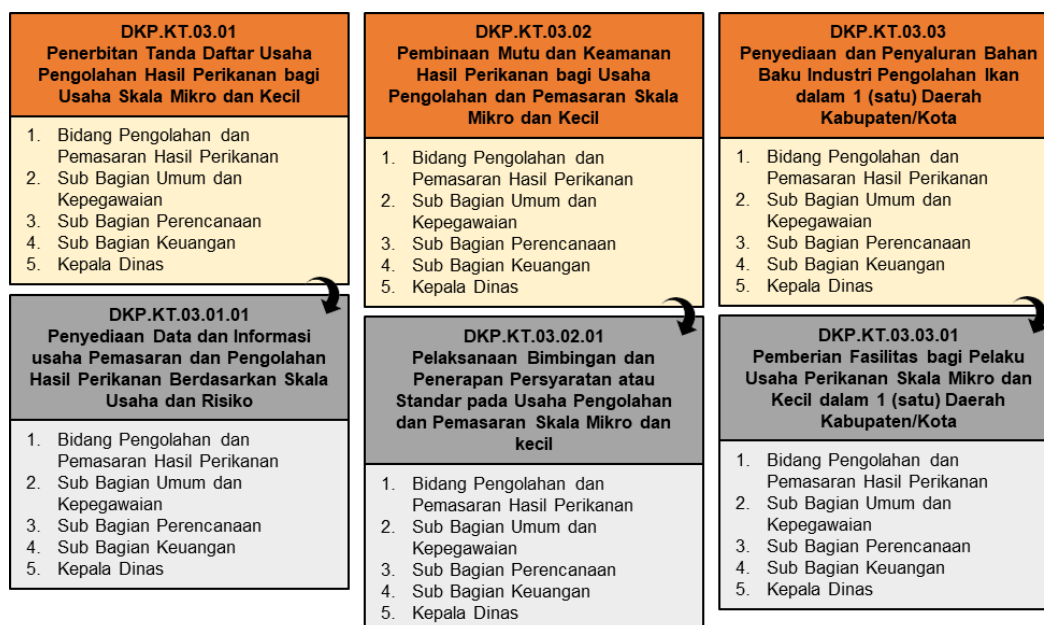
Peta relasi (*relationship map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta Relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan. Penyusunan peta relasi dapat dilakukan dengan cara memasukkan nama-nama unit organisasi yang terlibat didalam setiap proses dan sub proses, selanjutnya dilakukan proses finalisasi yang menggambarkan satker-satker yang terlibat didalamnya. Selengkapny gambar Peta Relasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate sebagai berikut:

### 1) DKP.KT.01 – Pengelolaan Perikanan Tangkap



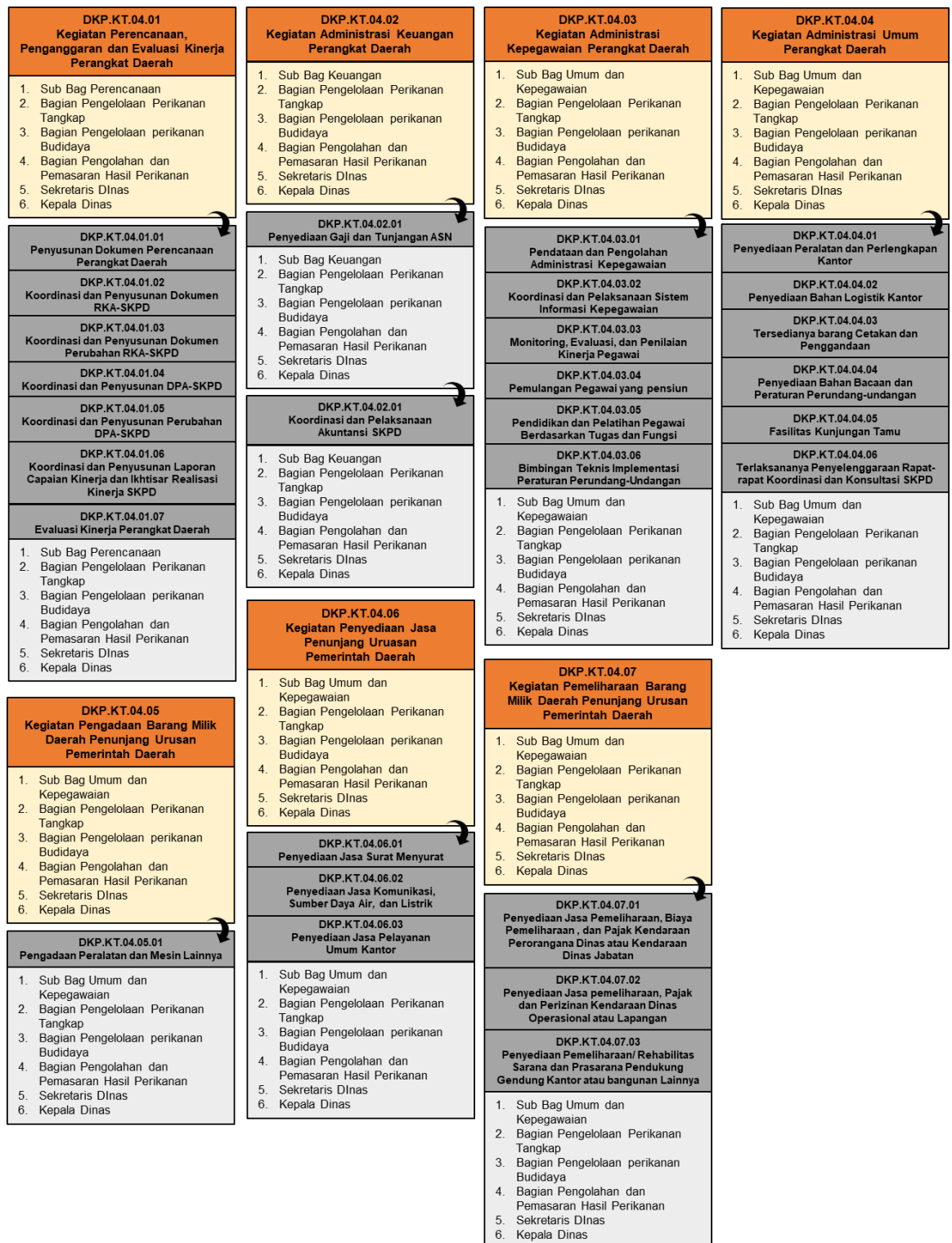
Gambar 5. Peta Relasi Program Pengelolaan Perikanan tangkap

## 2) DKP.KT.03 – Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan



Gambar 6. Peta Relasi Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

## 3) DKP.KT.04 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



Gambar 7. Peta Relasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### 4) DKP.KT.02 – Pengelolaan Perikanan Budidaya



Gambar 8. Peta Relasi Program Pengelolaan Perikanan Budidaya



## BAB V PENUTUP

Penyusunan Peta Proses Bisnis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate sebagai salah satu langkah untuk mendapatkan gambaran pelayanan yang ada di SKPD. Tujuan dari penyusunan Peta Proses Bisnis ini adalah agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien serta mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan. Semoga dengan penyusunan ini dapat memberikan gambaran terhadap proses bisnis yang ada di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate.